



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN  
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 145 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN PANGKAT DAN ANGKA KREDIT ASISTEN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.-nya;  
Mengingat : dst.-nya;  
Memperhatikan : dst.-nya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG PENETAPAN PANGKAT DAN ANGKA KREDIT ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KESATU : Asisten Ombudsman nomor urut 182 ditetapkan dengan Pangkat dan Angka Kredit sebagai berikut:

1. Nama : Fadjrianti Kariem, SH.
2. Jabatan/Pangkat Lama : Asisten Pratama I
3. Jabatan / Pangkat Baru : Asisten Pratama II
4. TMT : 1 Agustus 2020
5. Angka Kredit : 56,7
6. Ditugaskan Pada : Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 dengan ketentuan bahwa apabila ternyata di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
PROF. AMZULIAN RIFAI, SH., LL.M, PH.D

Untuk Petikan yang sah sesuai aslinya  
Sekretaris Jenderal,

Suganda Pandapotan Pasaribu



Verifikasi Elektronik

Keputusan Penetapan Pangkat dan Angka Kredit Asisten Ombudsman RI Nomor 145 Tahun 2020

Digital Signature  
ori-2757351134200717012706

Keputusan Penetapan Pangkat dan Angka Kredit Asisten Ombudsman RI Nomor 145 Tahun 2020

Keputusan Penetapan Pangkat dan Angka Kredit Asisten Ombudsman RI Nomor 145 Tahun 2020

Keputusan Penetapan Pangkat dan Angka Kredit Asisten Ombudsman RI Nomor 145 Tahun 2020

OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN  
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12/ORB-SE/IX/2016  
TENTANG

PENJANGKATAN ASISTEN PRATAMA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI  
RIAU DI PEKANBARU, PROVINSI BANGKA BELITUNG DI PANGKAL PINANG, PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR,  
PROVINSI GORONTALO DI GORONTALO, PROVINSI MALUKU UTARA DI TERNATE, DAN  
PROVINSI PAPUA BARAT DI MANOKWARI

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Meningkatkan : dsr. rya,  
Mengingat : dsr. rya,  
Menperhatikan : dsr. rya,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG PENJANGKATAN ASISTEN  
PRATAMA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI RIAU DI  
PEKANBARU, PROVINSI BANGKA BELITUNG DI PANGKAL PINANG,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, PROVINSI SULAWESI  
SELATAN DI MAKASSAR, PROVINSI GORONTALO DI GORONTALO,  
PROVINSI MALUKU UTARA DI TERNATE, DAN PROVINSI PAPUA BARAT  
DI MANOKWARI.
- KESATU** : Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia nomor urut: 10
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama                       | : Ridwan Kurnia, SH                          |
| 2. Tempat, Tgl. Lahir         | : Padang, 01-05-1992                         |
| 3. Keputusan Pengangkatan     | : 064/ORB-SE/VIII/2015, 11-08-2015           |
| 4. TMT Calon Asisten          | : 01-09-2015                                 |
| 5. Gaji Pokok Calon Asisten   | : Rp. 2.000.000,-                            |
| 6. Diangkat sebagai           | : Asisten Pratama                            |
| 7. TMT Asisten Pratama        | : 01-09-2016                                 |
| 8. Masa Kerja                 | : 1 Tahun 0 bulan                            |
| 9. Gaji Pokok Asisten Pratama | : Rp. 2.000.000,-                            |
| 10. Ditugaskan Pada           | : Perwakilan Ombudsman RI Prov.<br>Gorontalo |
- KEDUA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan dapat diberikan  
penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan, dengan  
kemudian berlaku apabila terdapat di kemudian hari terdapat keberatan,  
akan diadakan perbaikan seperluasnya.
- PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2016

Ketua Ombudsman Republik Indonesia,  
td  
Prof. Armanian Kido, SH., LL.M., Ph.D

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan  
Ombudsman Republik Indonesia  
Sekretaris Jenderal,



Alphonse Anindjanto, M. St. Acc.  
NIP. 19600729 198012 2 001



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: SEK-44/KU.03/01-TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, perlu menetapkan petugas yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa maka yang namanya terdapat dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeluaran dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5006);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 10/RS-SEKJEN-PR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 177) sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2/RS-SEKJEN-PR/IX/2010.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2017**




KESATU

Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya diangkat BPP Ombudsman RI:

1. Zukarnani, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh;
2. Arwanda Ginting, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemi Aprima, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat;
4. Silvia Nugrum, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau;
5. Jode Saragih, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau;
6. Lina Maryati Siregar, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi;
7. Rizo Sahrawan, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu;
8. Dodi Saleh, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan;
9. KGS. Chris Fisher, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bangka Belitung;
10. Eko Sulwen, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung;
11. Al-Siti Hajjah, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten;
12. Meghi Pradana, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat;
13. Samet Sudarnati, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah;
14. Duanita Wulanji, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Andik Sutahyono, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur;
16. Rahayu Setyaningrum, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat;
17. Chandra Sanjaya, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Diah Sari Fatmawati, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan;
19. Rie Mayesari, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur;
20. Moch. Darta, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara;
21. Yusuf Cacha Armatika, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara;

9. 12

22. Fadrianti Kariem, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo;
23. Idrus Pepuloi, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Hamatul Hasanah, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat;
25. Arel Syam, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan;
26. Sandy Ramadhan, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara;
27. Aditya Permata Putra sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali;
28. Nurzakiatun, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Barat;
29. Fajar Wihanenti, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Wani Wati Hanggoro, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku;
31. Sri Endang Mulyawati, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara;
32. Shulhan, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat;
33. Novanto, sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.

#### KEDUA

1. BPP Ombudsman RI adalah Pembantu Bendahara Pengeluaran Ombudsman RI yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan tugas pembendaharaan atas Uang Persediaan.

#### KETIGA

1. BPP Ombudsman RI memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2012 sebagai berikut:
  1. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP);
  2. Menerima melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
  3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPC;
  4. Meniadak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara;
  6. Menyisihkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
  7. Menatausahakan transaksi UP;
  8. Menyisenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
  9. Mengelola rekening simpanan penyimpanan UP.

g n

- KEEMPAT : BPP Ombudsman RI diberikan honorarium sebesar sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas BPP Ombudsman RI dibebankan pada anggaran Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-110.01.1.430624/2016, tanggal 25 November 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017, dengan ketentuan apabila saji di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Januari 2017

9 SEKRETARIS JENDERAL  
OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

  
A. RANAHARSO, Ak.M.Acc.  
NIP. 195907291984123001

Tembusan keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
2. Para Ombudsman Republik Indonesia.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.
4. Kepala Bim di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
5. Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Seluruh Indonesia.
6. Kepala Bagian Kepegawain dan Kelangkaan pada Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
7. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
8. Bendahara Pengeluaran Ombudsman Republik Indonesia.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



## **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

### **KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR. 61 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN PANGKAT ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 27 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia tentang Penetapan Pangkat Asisten Ombudsman Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6143);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 34);
6. Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ombudsman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 440);



7. Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 478);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penentuan, Promosi, dan Pengembangan serta Penetapan Penjurangan Karir Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 217).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Nomor 14/DEI-PP/10/2020 tanggal 30 Maret 2020

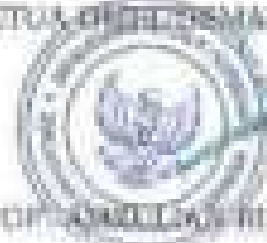
#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. PENETAPAN PANGKAT ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
- KESATU :
1. Asisten Ombudsman Republik Indonesia yang namanya tersebut dalam lajur 2, ditetapkan dengan pangkat sebagaimana didalam lajur 3.
- KEDUA :
1. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2020

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



PROF. DR. LUKMAN RIFA', SH., LL.M., PH.D.

Terdistribusi kepada Yth. :

1. Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta.
5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Ombudsman RI.

NO	NAMA ANGGOTA	PERHITAPAN TANGGAL
1		
2		
3	Devanatha Indra S. ST	Agustus 1980-1
4	Triadi Kusumadita, S.Sos	Agustus 1980-1
5	Putrawati Agus Darmanto, ST	Agustus 1980-1
6	Arifnya Mulyadana, ST, MMT	Agustus 1980-1
7	Magdalena Andriyanti, ST	Agustus 1980-1
8	Endang Widiyanti, S.Sos	Agustus 1980-1
9	Elisa Lubisana ST, C.L.M	Agustus 1980-1
10	Irma Paskia Supriat, ST	Agustus 1980-1
11	Chusniy Mahaningsih, ST	Agustus 1980-1
12	Andi Hidayat, ST	Agustus 1980-1
13	Wahyuni Andriyati, ST	Agustus 1980-1
14	Johny Paskia Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
15	Megalia Ningsih Supriat Dilla, ST	Agustus 1980-1
16	Meliana Pratiyoko Utami, ST, STI	Agustus 1980-1
17	Wicakana Eko Purwanto	Agustus 1980-1
18	Nurita Sari Dewi	Agustus 1980-1
19	Yeni Nurwati	Agustus 1980-1
20	Yuliana Tennydi Mulyadana	Agustus 1980-1
21	Winni Nurwati	Agustus 1980-1
22	Yeni Nurwati, ST	Agustus 1980-1
23	Putrawati Indra, ST, STI	Agustus 1980-1
24	Winni Paskia Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
25	Wicky Ningsih Nabila Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
26	Yuliana Mulyadana Dilla	Agustus 1980-1
27	Wahyuni Mulyadana	Agustus 1980-1
28	Putrawati Mulyadana	Agustus 1980-1
29	Yeni Nurwati, ST, STI	Agustus 1980-1
30	Wahyuni Mulyadana, ST, STI	Agustus 1980-1
31	Yeni Nurwati, ST	Agustus 1980-1
32	Winni Nurwati, ST, STI	Agustus 1980-1
33	Mahmud Fikriyoko, ST, MMT, STI, ST	Agustus 1980-1
34	Yeni Nurwati, ST	Agustus 1980-1
35	Putrawati Mulyadana Lili Dilla, ST	Agustus 1980-1
36	Megalia Dilla, ST	Agustus 1980-1
37	Megalia, Ningsih Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
38	Yeni, ST	Agustus 1980-1
39	Wahyuni Paskia, S.Sos	Agustus 1980-1
40	Wahyuni Paskia, ST	Agustus 1980-1
41	Putrawati, ST, ST, MMT	Agustus 1980-1
42	Yeni Nurwati Mulyadana, ST, STI	Agustus 1980-1
43	Yeni, ST	Agustus 1980-1
44	Andi Hidayat, ST	Agustus 1980-1
45	Wahyuni Mulyadana, S.Sos	Agustus 1980-1
46	Yeni Nurwati, ST	Agustus 1980-1
47	Yeni Nurwati Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
48	Yeni Nurwati Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
49	Wahyuni, S.Sos	Agustus 1980-1
50	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
51	Yeni Nurwati, ST, STI	Agustus 1980-1
52	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
53	Yeni Nurwati, S.Sos	Agustus 1980-1
54	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
55	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
56	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
57	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
58	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
59	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
60	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
61	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
62	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
63	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
64	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
65	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
66	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
67	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
68	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
69	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
70	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
71	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
72	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
73	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
74	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
75	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
76	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
77	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
78	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
79	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
80	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
81	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
82	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
83	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
84	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
85	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
86	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
87	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
88	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
89	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
90	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
91	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
92	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
93	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
94	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
95	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
96	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
97	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
98	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
99	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1
100	Wahyuni Mulyadana, ST	Agustus 1980-1

NO	NAMA AMBISI	PENYAJAR PANDIT
01	Abul Kalam, M.I	Asisten Pandita II
02	Farhan Fikriyati, S.Sos., M.A.P	Asisten Pandita II
03	Arifin Fikri Hidayat, ST, M.Kn	Asisten Pandita II
04	Endang Harti, S.Ag, M.Islam	Asisten Pandita II
05	Amir Syamsudin, ST	Asisten Pandita II
06	Abdul Halik Umar Fauzan, ST, M.I	Asisten Pandita II
07	Uti Hidayati, ST	Asisten Pandita II
08	Fitriyati, ST	Asisten Pandita II
09	Elisa Fitriyati, S.Ps, ST, M.I	Asisten Pandita II
10	Tri Liliyanti, S.Ps, S.S., M.A	Asisten Pandita II
11	Muhammad Agus Andriyana, ST, M.I, ST	Asisten Pandita II
12	Muhammad Mikiyati, S.Ps, M.I	Asisten Pandita II
13	Yuli Hidayati, S.Ps	Asisten Pandita II
14	Muhammad Rendi Mikiyati, ST	Asisten Pandita II
15	Amir Widiyati, ST, M.I	Asisten Pandita II
16	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
17	Fitriyati, S.Ps	Asisten Pandita II
18	Mariyati, S.Ps	Asisten Pandita II
19	Amir Widiyati, M.I	Asisten Pandita II
20	Muhammad D. Fauzan, S.Sos	Asisten Pandita II
21	Tri Hidayati, ST, M.I	Asisten Pandita II
22	Mariyati, ST	Asisten Pandita II
23	Amir Widiyati, ST, M.I	Asisten Pandita II
24	Muhammad Rendi Mikiyati, ST	Asisten Pandita II
25	Fitriyati, S.Ps	Asisten Pandita II
26	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
27	Fitriyati, S.Ps	Asisten Pandita II
28	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
29	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
30	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
31	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
32	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
33	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
34	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
35	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
36	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
37	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
38	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
39	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
40	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
41	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
42	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
43	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
44	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
45	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
46	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
47	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
48	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
49	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
50	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
51	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
52	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
53	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
54	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
55	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
56	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
57	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
58	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
59	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
60	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
61	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
62	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
63	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
64	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
65	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
66	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
67	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
68	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
69	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
70	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
71	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
72	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
73	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
74	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
75	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
76	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
77	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
78	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
79	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
80	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
81	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
82	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
83	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
84	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
85	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
86	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
87	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
88	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
89	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
90	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
91	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
92	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
93	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
94	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
95	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
96	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
97	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
98	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
99	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II
100	Uti Hidayati, S.Sos	Asisten Pandita II

NO	NAMA ANGGOTA	PERINGKAT PANGKAT
120	Rach. Chandra, M	Anggota Persepsi II
121	Rahmatullah, M	Anggota Persepsi II
122	Rafiq Nafis, M	Anggota Persepsi II
123	Rahmadi Nofar, S.Pd	Anggota Persepsi II
124	Rahman, M	Anggota Persepsi II
125	Rahmat, M, M	Anggota Persepsi II
126	Raf. Muband, M	Anggota Persepsi II
127	Rah. Pradiptha Kusumawati, M, M	Anggota Persepsi I
128	Rahm. Mardani Daryusman, M	Anggota Persepsi I
129	Rahm. Fauz. Haryani, M	Anggota Persepsi I
130	Rah. Prita, S.Sos	Anggota Persepsi II
131	Rahy. Kusumanti, M	Anggota Persepsi II
132	Rahm. Faridha, S.S.P	Anggota Persepsi II
133	Rahm. Permana, M	Anggota Persepsi II
134	Rah. Lailatul Hani, M	Anggota Persepsi II
135	Rahm. M. Nuzul, M	Anggota Persepsi II
136	Rah. And. Mardha Laksono, M	Anggota Persepsi II
137	Rahmat Ridwan, S.P	Anggota Persepsi II
138	Rahmat. Sumida, S.Pd	Anggota Persepsi II
139	Rahmadi, M	Anggota Persepsi I
140	Rahm. Permana, S.Sos, S.Pd	Anggota Persepsi II
141	Rahm. Supriatmawati, M	Anggota Persepsi II
142	Rah. Harumi, M	Anggota Persepsi II
143	R. Yusuf, Dwi Prita, S.Pd	Anggota Persepsi II
144	Rah. Satri Permana, M, M	Anggota Persepsi II
145	Rahma Dwi, M	Anggota Persepsi II
146	Rahm. Rahmatullah, S.Sos	Anggota Persepsi II
147	Rahm. Permana, S.Sos	Anggota Persepsi II
148	Rahm. Permana, S.Sos	Anggota Persepsi II
149	Rahm. Wicaksono, S.Sos, S.Pd	Anggota Persepsi II
150	Rah. Andrian, S.Sos	Anggota Persepsi II
151	Rah. Wicaksono, S.Sos	Anggota Persepsi II
152	Rah. Dwi, Dwi Wicaksono, S.Pd, M.Pd	Anggota Persepsi II
153	Rah. Nara Rani, M	Anggota Persepsi II
154	Rahm. A. Dinda, S.Sos	Anggota Persepsi II
155	Rahm. M. Haryani, M, M	Anggota Persepsi I
156	R. Dika. And. Nurita Dwi, S.Pd	Anggota Persepsi I
157	Rah. Triandriyana, S.Pd	Anggota Persepsi I
158	Rahm. M. Mardani, S.Pd	Anggota Persepsi I
159	Rahm. Fauz. Permana Dinda, M	Anggota Persepsi I
160	Rahmat Fauz. Dika, M	Anggota Persepsi I
161	Rahm. Mardani, M	Anggota Persepsi I
162	Rah. Fauz. Permana Permana, M, M	Anggota Persepsi I
163	Rahm. Mardani, S.Sos, M	Anggota Persepsi I
164	Rah. Fauz. Mardani, M	Anggota Persepsi I
165	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
166	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
167	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
168	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
169	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
170	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
171	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
172	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
173	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
174	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
175	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
176	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
177	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
178	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
179	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
180	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
181	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
182	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
183	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
184	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
185	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
186	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
187	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
188	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
189	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
190	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
191	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
192	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
193	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
194	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
195	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
196	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
197	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
198	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
199	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I
200	Rahm. Fauz. Permana, M	Anggota Persepsi I

NO	NAMA ADIKTAN	PEMBAYARAN NASIBAT
201	Agus Mardiana, S.Su	Akutan, Prastama I
202	Ira Nurhuda Nurita, MI	Akutan, Prastama I
203	Harini	Akutan, Prastama I
204	Clara M. Purba, S.Su	Akutan, Prastama I
205	Ayana Sula Arsyanta, MI, MI	Akutan, Prastama I
206	St. Paula, SC, M.Si	Akutan, Prastama I
207	Idris, Dugan Samudra, S.I	Akutan, Prastama I
208	Indrawati, S.Su	Akutan, Prastama I
209	Reza Dinda, HI	Akutan, Prastama I
210	Rina Laksana Laksana, S.Ikt	Akutan, Prastama I
211	Pontika Laksana, Naposin	Akutan, Prastama I
212	Pritama Wafana	Akutan, Prastama I
213	Gery Indro Sula H. Sanga	Akutan, Prastama I
214	Rina Yita Andika	Akutan, Prastama I
215	Maulana Putra	Akutan, Prastama I
216	Raka Herlan Aruna	Akutan, Prastama I
217	Indah Rumi	Akutan, Prastama I
218	Haris Widiy Ningrum	Akutan, Prastama I
219	Ruli Kurniawan	Akutan, Prastama I
220	Akash Mar Ismail	Akutan, Prastama I
221	Harifurri Rofiqi Raza	Akutan, Prastama I
222	Prastama	Akutan, Prastama I
223	Sharon Purnika Simanjuntak	Akutan, Prastama I
224	Achmad Rudianto Jundi	Akutan, Prastama I
225	Arhanandi, Elham Darmawan	Akutan, Prastama I
226	Nurmanita Atri Setiandita	Akutan, Prastama I
227	Indah Rumi	Akutan, Prastama I
228	Utami Aulid Indro	Akutan, Prastama I
229	Umi Prastama	Akutan, Prastama I
230	Rahmat Wicakanti	Akutan, Prastama I
231	Adhira Nurani	Akutan, Prastama I
232	Rani Harash	Akutan, Prastama I
233	Artita Prastama	Akutan, Prastama I
234	Harlan Aswari R. P.	Akutan, Prastama I
235	Adhira Raka	Akutan, Prastama I
236	Harlan Nurani R. Widiya	Akutan, Prastama I
237	Indah Rumi	Akutan, Prastama I
238	Muhammad Iqbal Galla Putra	Akutan, Prastama I
239	Devi Prastama Sari	Akutan, Prastama I
240	Dya Iqbal	Akutan, Prastama I
241	Harlan	Akutan, Prastama I
242	Haris Rani Setiati	Akutan, Prastama I
243	Rani Raka	Akutan, Prastama I
244	Adhira Rumi Indro Harash	Akutan, Prastama I
245	Prastama Indro Harash	Akutan, Prastama I
246	Adhira Rumi	Akutan, Prastama I
247	Indah Rumi Prastama	Akutan, Prastama I
248	Gery Indro, S.P., M.Si	Akutan, Prastama I
249	Muhammad Indro Nurani, S.P., M.Si, M.Pi	Akutan, Prastama I
250	Harlan	Akutan, Prastama I
251	Harlan Rani Prastama	Akutan, Prastama I
252	Rani Prastama	Akutan, Prastama I
253	Adhira Rumi	Akutan, Prastama I
254	Harlan R. Prastama	Akutan, Prastama I
255	Harlan Rumi	Akutan, Prastama I
256	Rani Prastama	Akutan, Prastama I
257	Indah Rumi Prastama I	Akutan, Prastama I
258	Indah Rumi Prastama	Akutan, Prastama I
259	Harlan Rumi Prastama	Akutan, Prastama I
260	Harlan Rumi Prastama	Akutan, Prastama I
261	Harlan Rumi Prastama	Akutan, Prastama I
262	Harlan Rumi Prastama	Akutan, Prastama I
263	Harlan Rumi Prastama	Akutan, Prastama I
264	Harlan Rumi Prastama	Akutan, Prastama I
265	Harlan Rumi Prastama	Akutan, Prastama I
266	Harlan Rumi Prastama	Akutan, Prastama I
267	Harlan Rumi Prastama	Akutan, Prastama I
268	Harlan Rumi Prastama	Akutan, Prastama I
269	Harlan Rumi Prastama	Akutan, Prastama I
270	Harlan Rumi Prastama	Akutan, Prastama I

NO	NAMA ANGGOTA	PENTAPAKS BAKERS
111	Prasetyo Nugroho	Anggota Prastama 1
112	M. Shifany	Anggota Prastama 1
113	Syahrul Ghamsy Rakh Thofailah	Anggota Prastama 1
114	Agung Purnawidjaja (Dua Putri)	Anggota Prastama 1
115	Rusdiana Andriani	Anggota Prastama 1
116	Orisa Dendrian	Anggota Prastama 1
117	Imam Dedi Bagyalani	Anggota Prastama 1
118	Fahri Indrayudhan, ST	Anggota Prastama 1
119	Irwan Awi Widyadipati, S.IP	Anggota Prastama 1
120	Muhammad Anwar Nuri, S.IP	Anggota Prastama 1
121	Han Husein Hidayatullah, ST	Anggota Prastama 1
122	Reza Azzah	Anggota Prastama 1
123	Jon Dedi Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
124	Arhamul Dauli Muzamadz	Anggota Prastama 1
125	Fahri Mulyono	Anggota Prastama 1
126	Muhammad	Anggota Prastama 1
127	Yusuf Mubdal Jafar	Anggota Prastama 1
128	Wahid Al Hamdani	Anggota Prastama 1
129	Wahid Huda	Anggota Prastama 1
130	Yusuf Murno Achmad	Anggota Prastama 1
131	Yusuf Murno Achmad Adhi Hamdan	Anggota Prastama 1
132	I Lutfi Firdi Putra	Anggota Prastama 1
133	Yusuf Awi Tjapayana	Anggota Prastama 1
134	I Gusti Mawati Ardiyana Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
135	Muhammad Fikri Ridwan	Anggota Prastama 1
136	Dr. Awi Wawan Muryono, Jendral	Anggota Prastama 1
137	Reza Wahyuni	Anggota Prastama 1
138	Abel Nurul	Anggota Prastama 1
139	Husniyah Nurul Fida	Anggota Prastama 1
140	Yusuf William Dini	Anggota Prastama 1
141	Thalysia M. Jemali	Anggota Prastama 1
142	Alvin Roy Rini	Anggota Prastama 1
143	Harini Gunawan	Anggota Prastama 1
144	Reza Ghofar	Anggota Prastama 1
145	Arhamul Murno	Anggota Prastama 1
146	Wahid	Anggota Prastama 1
147	Wahid Awi Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
148	Dr. Ridwan	Anggota Prastama 1
149	Muhammad Awi	Anggota Prastama 1
150	Muhammad Mulya Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
151	Yusuf Murno	Anggota Prastama 1
152	Wahid Nurul Fida	Anggota Prastama 1
153	Arhamul Murno Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
154	Reza Ghofar Widyono	Anggota Prastama 1
155	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
156	Muhammad Nurul Fida	Anggota Prastama 1
157	Yusuf Awi Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
158	Wahid Nurul Fida	Anggota Prastama 1
159	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
160	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
161	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
162	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
163	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
164	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
165	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
166	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
167	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
168	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
169	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
170	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
171	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
172	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
173	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
174	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
175	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
176	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
177	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
178	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
179	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
180	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
181	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
182	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
183	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
184	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
185	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
186	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
187	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
188	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
189	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
190	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
191	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
192	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
193	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
194	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
195	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
196	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
197	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
198	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
199	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1
200	Wahid Nurul Fida Purnawidjaja	Anggota Prastama 1

NO	NAMA ANGGOTA	PUSATAPAN PANGKAT
340	Rehatyari Harfani	Anggota Prastawa I
341	Muhammad Aeri	Anggota Prastawa I
342	Chen Wensheng Tang	Anggota Prastawa I
343	Sufyan Kadir	Anggota Prastawa I
344	Andika Mohammad Nurhan	Anggota Prastawa I
345	Linda Lintang Sari Kurnia	Anggota Prastawa I
346	Indi Harjanto Rano	Anggota Prastawa I
347	Andri Yohanes Kurniawan	Anggota Prastawa I
348	David Muhammad Haryono Alim	Anggota Prastawa I
349	Viviana Mawar Dwarika	Anggota Prastawa I
350	I Purnama Raga Hartono	Anggota Prastawa I
351	Martina Muchlis Yumarti	Anggota Prastawa I
352	Muhammad Akbar Luvira	Anggota Prastawa I
353	Peta Prati Andriyana	Anggota Prastawa I
354	Dani Muhammad Daryawan	Anggota Prastawa I
355	Muhammad Irfan M. Samudra	Anggota Prastawa I
356	Nural Firdi Huda	Anggota Prastawa I
357	Abdi Kurnia	Anggota Prastawa I
358	Ranny Haryanto Luthiana	Anggota Prastawa I
359	Ikhsan Mulyono	Anggota Prastawa I
360	Yusufita Nurulhikmah Murtawati	Anggota Prastawa I
361	Indira Margita Putri	Anggota Prastawa I
362	Polina	Anggota Prastawa I
363	David Fajra Muhammad	Anggota Prastawa I
364	Mikha Prastawa	Anggota Prastawa I
365	Muhammad Fajar	Anggota Prastawa I
366	Riz Saputra	Anggota Prastawa I
367	Adnan Tereq Ridwan	Anggota Prastawa I
368	Aisya Nurulhikmah Andika	Anggota Prastawa I
369	Ranatha Shadia Prastawa Putri	Anggota Prastawa I
370	Anang Prastawa	Anggota Prastawa I
371	Christina Riana	Anggota Prastawa I
372	Fit Lintang Sinterwand	Anggota Prastawa I
373	Yudi Lintang, S1. MKA	Anggota Prastawa I
374	Yudi Yudi	Anggota Prastawa I
375	Muhammad Nurul Hani	Anggota Prastawa I
376	Paulus Ramadani	Anggota Prastawa I
377	Yudi Widi	Anggota Prastawa I
378	Yudi Hana Prastawa	Anggota Prastawa I
379	Wibisono Rana	Anggota Prastawa I

Disamping di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 2020

KAPOLDA RIWAYAT RUMAH KOTA INDOYONIA



KAPOLDA, SSK, LL, LL, PPL, PL



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: SEK-01-KU.03.01-TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, perlu menetapkan petugas yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  - 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4898).



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1/ORS-SERJEN-PROV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 177) sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3/ORS-SERJEN-PROV/2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN TENTANG PENGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN**

9 13 2

- KESATU
- 1. Mengubah Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPP pada Ombudsman Republik Indonesia, sebagai berikut:
    - 1. Memberhentikan Sdr. Yogi Orlavianus Sihombing sebagai BPP Sementara pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah dan Mengangkat Sdr. Chusma Sahjaya sebagai BPP Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah terhitung sejak tanggal 01 Juli 2017.
    - 2. Memberhentikan Sdr. Fadriadi Karam sebagai BPP pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo dan Mengangkat Sdr. Djunaidi F. Laode sebagai BPP Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo terhitung sejak tanggal 01 Juli 2017.
- KEDUA
- 1. BPP Ombudsman RI adalah Pembantu Bendahara Pengeluaran Ombudsman RI yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan tugas perbendaharaan atas Uang Perantara.
- KETIGA
- 1. BPP Ombudsman RI memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 sebagai berikut:
    - 1. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP);
    - 2. Menerima melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
    - 3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
    - 4. Mencatat perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
    - 5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara;
    - 6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas negara;
    - 7. Menatausahakan transaksi UP;
    - 8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
    - 9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
- KEEMPAT
- 1. BPP Ombudsman RI diberikan honorarium sebesar sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas SPP Ombudsman RI dibebankan pada anggaran Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-110.01.1.439624/2016, tanggal 25 November 2016.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2017, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Juli 2017

9- PR. SEKRETARIS JENDERAL  
OMBUDESMAN REPUBLIK INDONESIA,



↑ DR. HARTOYO, SH, M.Hum, M.Si.  
NIP 196209021982031002

Tembusan keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
2. Para Ombudsman Republik Indonesia.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.
4. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
5. Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Seluruh Indonesia.
6. Kepala Bagian Kepegawaian dan Ketatausahaan pada Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
7. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
8. Bendahara Pengeluaran Ombudsman Republik Indonesia.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.